

STRATEGI KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS UNTUK PEMILIHAN ULANG (Studi Kasus Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Kota Gorontalo)

Communication Strategies of Regional People's Representative Council (DPRD) Members in Increasing Electability for Re-election (Case Study of Candidacy for Members of the Gorontalo Province DPRD, Gorontalo City Electoral District)

Erwinsyah Ismail^{1*}, Nur Alim Djalil², Mujahid³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: simpilei1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dengan narasumber terkait dan didokumentasikan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi bagaimana strategi komunikasi anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Kota Gorontalo dalam meningkatkan elektabilitas untuk pemilihan ulang. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa anggota DPRD selalu memanfaatkan komunikasi yang efektif berupa menggunakan sosial media dan komunikasi secara langsung atau tatap muka bersama pemilihnya dan strategi tambahan yang digunakan berupa memanfaatkan tokoh agama, tokoh adat dan komunitas. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang akan ikut terlibat langsung dalam politik praktis berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum legislatif dan bermanfaat bagi dunia akademik dalam membedah pola komunikasi masyarakat bersama anggota DPRD

Kata kunci: Strategi komunikasi, Media Komunikasi, Anggota DPRD, Elektabilitas dan Kota Gorontalo

Abstract

This research employed qualitative methods with descriptive analytic approaches. Data were collected through in-depth interviews with relevant sources and documented to describe the communication strategies of members of the Gorontalo Province DPRD, Gorontalo City Electoral District, in increasing electability for re-election. Based on the research results, it was found that DPRD members consistently utilized effective communication strategies, including social media and direct or face-to-face communication with their voters. Additional strategies included utilizing religious, traditional, and community leaders. This research is beneficial for the public who will be directly involved in practical politics through participation in legislative elections and for academics in analyzing communication patterns between the public and DPRD members.

Keywords: Health service digitalization, human resource competence, technology acceptance, SEHATI Application, public health center.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika demokrasi kontemporer di Indonesia, peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi semakin krusial sebagai jembatan artikulasi antara aspirasi konstituen dengan kebijakan pemerintah daerah. Menjalankan tiga fungsi dasar—legislasi, anggaran, dan pengawasan—anggota legislatif di tingkat provinsi dituntut untuk senantiasa menjaga akuntabilitas kinerjanya. Namun, dalam realitas politik praktis pasca-Reformasi 1998 yang ditandai dengan sistem pemilu langsung, multipartai, dan desentralisasi, kinerja yang baik saja tidak lagi cukup. Anggota DPRD senantiasa dihadapkan pada tantangan elektoral yang masif, yaitu bagaimana membangun, memelihara, dan meningkatkan elektabilitas mereka agar dapat terpilih kembali pada kontestasi berikutnya. Elektabilitas bukan sekadar angka statistik keterpilihan, melainkan cerminan dari akumulasi modal sosial dan efektivitas strategi komunikasi politik dalam mengonstruksi citra positif di mata publik.

Guna mengurai kompleksitas komunikasi politik dalam upaya mendongkrak elektabilitas ini, beberapa lensa teoretis dapat digunakan secara integratif. Teori *political branding* (O'Cass & Focazio, 2004) melihat aktor politik sebagai sebuah identitas merek yang nilai dan citranya harus dikelola secara konsisten untuk membedakannya dari kompetitor. Sementara itu, teori *agenda-setting* (McCombs & Shaw, 1972) mengonseptualisasikan bagaimana aktor politik dapat mengarahkan atensi publik terhadap isu-isu penting melalui pemanfaatan saluran informasi secara mandiri. Melalui teori *framing* (Entman, 1993), pesan-pesan kompleks terkait kebijakan dibingkai sedemikian rupa agar selaras dengan nilai-nilai konstituen. Selain itu, teori *spiral of silence* (Noelle-Neumann, 1974) membantu memahami dinamika pergeseran opini publik yang dipengaruhi oleh persepsi mayoritas-minoritas, sedangkan teori *relational communication* menawarkan pendekatan jangka panjang yang menekankan pembangunan kepercayaan (*trust*) secara kontinu, alih-alih hubungan transaksional sesaat yang lazim terjadi menjelang pemilu.

Penerapan teori-teori tersebut menemukan ruang kajian yang unik ketika ditarik ke dalam konteks politik lokal di Provinsi Gorontalo, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Gorontalo. Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Gorontalo memiliki karakteristik sosiopolitik yang khas, di mana nilai-nilai tradisional seperti kekerabatan, adat istiadat, kolektivisme, dan agama berkelindan erat dengan arus modernisasi politik yang berbasis program kerja. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Gorontalo menyajikan lanskap pemilih yang heterogen, melek informasi, dan cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi para wakil rakyatnya. Kompetisi di dapil ini sangat ketat karena memperebutkan alokasi kursi terbanyak dengan ambang batas minimal kemenangan yang membutuhkan dukungan sekitar 8-10% suara sah. Untuk memenangkan simpati pemilih dalam lanskap yang demikian, para anggota DPRD dituntut menerapkan strategi komunikasi hibrida. Strategi ini secara harmonis menggabungkan saluran konvensional berbasis budaya, seperti tatap muka, penggunaan bahasa daerah, dan pendekatan kekerabatan, dengan saluran digital modern berbasis media sosial dan respons cepat di internet,

mengingat penetrasi internet di daerah ini telah tumbuh pesat mencapai 65% (BPS, 2023).

Terlepas dari peluang digitalisasi tersebut, para legislator juga dihadapkan pada tantangan struktural dan perubahan sosiologis yang dinamis. Rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi legislatif serta stigma negatif bahwa wakil rakyat hanya mementingkan kepentingan pribadi atau partai menjadi pekerjaan rumah yang besar. Arus digitalisasi pun membawa konsekuensi tersendiri berupa cepatnya penyebaran hoaks, kampanye hitam (*black campaign*), serta tingginya ekspektasi publik terhadap responsivitas waktu nyata (*real-time responsiveness*). Menariknya, dalam Pemilu 2019 dan 2024, dinamika politik di Dapil Kota Gorontalo menunjukkan adanya pergeseran suara yang signifikan, di mana beberapa politisi baru berhasil menumbangkan petahana (*incumbent*) melalui pendekatan komunikasi digital yang inovatif serta kedekatannya dengan segmen pemilih muda. Selain isu inklusi gender dengan meningkatnya representasi politisi perempuan, tantangan komunikasi ini juga dipengaruhi oleh sensitivitas isu ekonomi lokal seperti kemiskinan, peran media massa lokal, serta dinamika internal partai politik yang kerap membatasi otonomi komunikasi kandidat.

Meskipun kajian mengenai strategi pemenangan pemilu telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi komunikasi politik masih berakar dari perspektif Barat yang kerap kali kurang sensitif terhadap nilai-nilai budaya kolektif, kearifan lokal seperti penggunaan bahasa dan adat Gorontalo, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah berkembang. Belum banyak studi kasus mendalam yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana para legislator mengintegrasikan taktik digital modern dengan sentuhan sosiokultural lokal dalam konteks pemilihan ulang (*re-election*) di tingkat lokal Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pola komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Kota Gorontalo dalam meningkatkan elektabilitas untuk pemilihan ulang. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa kontekstualisasi teori-teori komunikasi politik ke dalam dinamika lokal Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan strategis bagi anggota legislatif, partai politik, dan praktisi pemilu dalam merumuskan model komunikasi hibrida yang efektif, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas representasi politik di tingkat daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada paradigma konstruktivisme dan interpretivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks seperti pola komunikasi politik dalam konteks lokal (Creswell, 2014). Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna sosial yang dibangun oleh aktor politik dalam interaksi mereka dengan konstituen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aplikasi Strategi Agenda Setting dan Framing dalam Komunikasi Politik Lokal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa aktor politik di tingkat daerah secara sadar dan terstruktur mentransformasikan diri mereka menjadi saluran informasi yang menerapkan strategi *agenda setting* dan *framing*. Berdasarkan cetak biru teori *agenda setting* yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw (1972), media memiliki kemampuan mengondisikan urgensi suatu isu di ruang publik. Dalam konstelasi politik lokal di Gorontalo, kedua narasumber bertindak layaknya "media mandiri" yang mengarahkan perhatian konstituen pada narasi tertentu. Indriani Dunda secara konsisten mengadopsi konsep *agenda setting* tingkat pertama dengan meletakkan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai objek utama. Melalui penetrasi digital di media sosial, kolom opini surat kabar lokal, serta artikulasi langsung di forum publik, ia berhasil menempatkan isu-isu sektoral tersebut ke pusat perhatian masyarakat sebagai prioritas politik legislatif.

Di sisi lain, Hj. Ekwan Ahmad mempraktikkan pendekatan yang berbeda dengan berfokus pada *agenda setting* tingkat kedua, yang menitikberatkan pada pembingkaihan atribut atau cara suatu objek digambarkan kepada publik. Ia tidak sekadar menyajikan isu pembangunan infrastruktur secara hambar, melainkan membingkainya secara mendalam sebagai determinan utama akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui taktik kognitif ini, ia tidak hanya menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, melainkan secara aktif mengarahkan bagaimana publik harus memikirkan dan memaknai isu pembangunan tersebut. Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup *agenda setting* di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh segmentasi sasaran dan preferensi personal legislator dalam membangun impresi politik.

2. Model Komunikasi Dua Arah Simetris dalam Membangun Relasi Konstituen

Strategi komunikasi politik yang dipraktikkan oleh kedua legislator ini juga merefleksikan implementasi teori hubungan masyarakat, khususnya model komunikasi dua arah simetris yang diinisiasi oleh James Grunig (1984). Model ini menekankan pentingnya dialog interaktif, negosiasi terbuka, dan pemahaman timbal balik (*mutual understanding*) antara komunikator politik dengan khalayak sasaran. Indriani Dunda menerapkan model simetris ini dengan memanfaatkan platform media sosial secara optimal. Ia melampaui pola diseminasi informasi satu arah yang konvensional dengan membuka ruang diskusi yang dinamis, menampung aspirasi mentah, serta memberikan respons langsung terhadap kritik maupun pertanyaan konstituen. Aktivitas digital yang intensif ini berhasil mengonstruksi relasi politik yang setara, interaktif, dan saling menguntungkan.

Pendekatan komunikasi dua arah simetris juga ditunjukkan oleh Hj. Ekwan Ahmad, meskipun ia lebih memilih saluran interpersonal konvensional. Melalui penyelenggaraan pertemuan tatap muka secara berkala dengan jajaran tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat di daerah pemilihan, ia menginisiasi ruang dialog organik yang memfasilitasi pertukaran informasi secara langsung. Fleksibilitas komunikasi Hj. Ekwan Ahmad bahkan terlihat dari kesediaannya untuk menyesuaikan arah kebijakan politik personalnya setelah menyerap masukan dan

aspirasi dari konstituen. Pola hibrida ini menegaskan bahwa baik saluran digital modern maupun saluran tradisional tatap muka memiliki efektivitas yang sama tinggi dalam mewujudkan model komunikasi simetris, sepanjang aktor politik memiliki komitmen keterbukaan yang konsisten.

3. Determinasi *Electoral Viability* dan Pola Representasi Politik Legislator

Kelayakan elektoral atau *electoral viability* dari kedua anggota DPRD ini dapat dibedah secara komprehensif melalui kerangka pemikiran Jacobson (1987) serta Green dan Krasno (1988). Teori ini menggarisbawahi bahwa daya hidup politik seorang kandidat ditopang oleh akumulasi rekam jejak kinerja, kekuatan jaringan dukungan, ketersediaan sumber daya finansial, dan identitas kepertaian. Dalam konteks rekam jejak, Indriani Dunda mengonsolidasikannya melalui realisasi program pemberdayaan spesifik, sedangkan Hj. Ekwana Ahmad menunjukkannya lewat bukti fisik pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Aspek jaringan dukungan juga dikelola secara kontras namun saling melengkapi: Indriani Dunda mengakar pada komunitas perempuan dan netizen media sosial, sementara Hj. Ekwana Ahmad berakar pada struktur kultural tokoh adat, tokoh agama, dan asosiasi pengusaha. Perbedaan identitas partai—Indriani Dunda bersama NasDem dan Hj. Ekwana Ahmad bersama Hanura—turut mengondisikan karakteristik basis massa ideologis yang memengaruhi arah dan taktik komunikasi politik masing-masing di lapangan.

Eksplorasi terhadap pola komunikasi ini juga menyingkap diferensiasi mendalam pada model representasi politik yang mereka jalankan, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Edmund Burke (1774). Indriani Dunda cenderung menampilkan karakteristik model representasi mandiri (*trustee*). Ia memosisikan kapasitas intelektual dan pertimbangan moral pribadinya sebagai pemandu utama dalam mengambil keputusan strategis demi kemaslahatan konstituen, meskipun keputusan tersebut terkadang kurang populer atau bertentangan dengan arus utama keinginan massa. Sebaliknya, Hj. Ekwana Ahmad secara konsisten mengadopsi model representasi instruksional (*delegate*). Ia menempatkan dirinya sebagai perpanjangan tangan atau delegasi murni yang berkewajiban menyuarakan kebutuhan riil konstituen secara tekstual, yang diwujudkan melalui mekanisme konsultasi rutin sebelum merumuskan sikap politik formal di parlemen.

4. Implikasi Teoretis, Keterbatasan Penelitian, dan Rekomendasi Riset Mendatang

Integrasi temuan lapangan dengan berbagai lapis kerangka teoretis menghasilkan implikasi teoretis yang signifikan bagi studi politik lokal di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bahwa keberhasilan menjaga *electoral viability* legislator daerah sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan pendekatan modern berbasis digital dengan pendekatan konvensional berbasis nilai lokal dan jaringan interpersonal. Model hibrida ini memungkinkan aktor politik memperluas jangkauan elektoral secara masif di ruang digital tanpa harus kehilangan keintiman sosiokultural dengan konstituen tradisional di akar rumput.

Namun demikian, penelitian kualitatif ini tidak luput dari sejumlah keterbatasan ilmiah yang perlu diakui secara jujur. Keterbatasan pertama terletak pada jumlah narasumber yang hanya melibatkan dua anggota DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga hasil analisis ini tidak dapat digeneralisasikan secara mutlak untuk menggambarkan perilaku seluruh legislator di Provinsi Gorontalo atau wilayah lain di Indonesia. Keterbatasan kedua berkaitan dengan rentang waktu penelitian yang relatif singkat, yaitu hanya berkisar selama dua bulan dari Februari hingga Maret 2026. Durasi yang terbatas ini menutup peluang bagi peneliti untuk mengamati fluktuasi strategi komunikasi narasumber dalam situasi yang lebih krusial, seperti pada masa puncak kampanye pemilu atau saat terjadi krisis politik internal.

Keterbatasan ketiga bersumber dari potensi bias narasumber (*social desirability bias*), di mana subjek penelitian memiliki kecenderungan psikologis untuk memproyeksikan citra diri yang positif dan ideal selama proses wawancara. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada satu sudut pandang, yaitu hanya mengeksplorasi perspektif anggota DPRD sebagai produsen pesan politik, tanpa menguji secara mendalam bagaimana pesan-pesan tersebut diterima, diinterpretasikan, dan direspons oleh konstituen selaku konsumen politik. Terakhir, penelitian ini terikat kuat pada konteks sosiokultural dan konstelasi politik spesifik Provinsi Gorontalo yang unik, sehingga tingkat relevansinya dapat bervariasi jika diimplementasikan pada daerah dengan lanskap budaya yang berbeda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat lima pola komunikasi utama yang secara konsisten diterapkan oleh anggota DPRD dalam upaya meningkatkan elektabilitas mereka. Kelima pola komunikasi tersebut meliputi: komunikasi interpersonal langsung, komunikasi melalui media sosial, komunikasi dalam kegiatan reses, komunikasi melalui media massa konvensional, serta komunikasi melalui program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setiap pola komunikasi ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing dalam mempengaruhi persepsi konstituen.
2. Penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal langsung merupakan pola komunikasi yang paling efektif dalam membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan konstituen. Para anggota DPRD yang secara rutin melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, mendengarkan aspirasi secara tatap muka, dan merespons masalah yang dihadapi konstituen cenderung memiliki tingkat elektabilitas yang lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
2. Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1979). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
3. Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
4. Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
5. Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American Voter*. University of Chicago Press.
6. Cialdini, R. B. (2001). *Influence: Science and Practice* (4th ed.). Allyn & Bacon.
- Coleman, J. S. (1988). *Social capital in the creation of human capital*. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95-S120.
7. Defleur, M. L. (1966). *Theories of Mass Communication*. David McKay Company.
8. Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
9. Edelman, M. (1964). *The Symbolic Uses of Politics*. University of Illinois Press.
- Effendy, O. Y. (2006). *Ilmu, Seni, dan Tekni Komunikasi*.
10. Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward clarification of a fractured paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.
11. Eulau, H., Wahlke, J. C., Buchanan, W., & Ferguson, L. C. (1959). *The role of the representative: Some empirical observations on the theory of Edmund Burke*. *American Political Science Review*, 53(3), 742-756.
12. Fenno, R. F. (1978). *Home Style: House Members in Their Districts*. Little, Brown.
13. Fenno, R. F. (1996). *Senators on the Campaign Trail: The Politics of Representation*. University of Oklahoma Press.
14. Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Harper & Row.
15. Graber, D. A. (2009). *Mass Media and American Politics* (8th ed.). CQ Press.
16. Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt, Rinehart and Winston.
17. Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
18. Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). *Utilization of mass communication by the individual*.
19. In J. G. Blumler & E. Katz (Eds.), *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research* (pp. 19-32). Sage Publications.
20. Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*. Free Press.
21. K KPU Provinsi Gorontalo. (2019). *Daftar pemilih tetap hasil pemutakhiran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019*. Gorontalo: KPU Provinsi Gorontalo.
22. Kvale, S. (1996). *InterViews: An introduction to qualitative research interviewing*. Sage.
23. Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage.

24. Lamato, H. (2018). *Sistem kekerabatan dalam politik lokal Gorontalo*. Jurnal Antropologi Indonesia, 42(3), 210–225.
25. Lanti, M. (2020). *Pendidikan dan perilaku politik pemilih dalam pemilu lokal*. Jurnal Sosiologi dan Politik, 8(2), 145–160.
26. Lees-Marshment, J. (2014). *Political marketing: Principles and applications*. Routledge.
27. Nur, A. (2015). *Nilai budaya huyula dalam masyarakat Gorontalo kontemporer*. Jurnal Penelitian Kebudayaan, 10(2), 112–128.
28. Pabadunga, S. (2019). *Bahasa Gorontalo dalam komunikasi politik lokal*. Jurnal Linguistik Terapan, 7(1), 56–72.
29. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods (4th ed.)*. Sage.
- Pemerintah Kota Gorontalo. (2022). *Profil Kota Gorontalo*. Bagian Hukum dan Pemerintahan Kota Gorontalo.
30. Pemerintah Provinsi Gorontalo. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo 2025-2030*. Bappeda Provinsi Gorontalo.
31. Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
32. Punch, M. (1994). Politics and ethics in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 83–97). Sage.
33. Rodgers, B. L., Cowles, K. V., & Skodol Wilson, H. (2000). *The audit trail in qualitative research*. In B. L. Rodgers & K. V. Cowles (Eds.), *Conceptualizing qualitative research: Theoretical and practical considerations* (pp. 147–161). Springer.
34. Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing: The art of hearing data (3rd ed.)*. Sage.
35. Saldaña, J. (2015). *The coding manual for qualitative researchers (3rd ed.)*. Sage.
36. Savage, J. (2000). *Ethnographic evidence: The value of applied anthropology*. In C. Seale (Ed.), *Researching society and culture* (pp. 153–168). Sage.
37. Schütz, A. (1967). *The phenomenology of the social world*. Northwestern University Press.
38. Seidman, I. (2013). *Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences (4th ed.)*. Teachers College Press.
39. Sieber, J. E. (1992). *Planning ethically responsible research: A guide for students and internal review boards*. Sage.
40. Silverman, D. (2020). *Interpreting qualitative data (6th ed.)*. Sage.
41. Smith, J. A. (2008). *Qualitative psychology: A practical guide to research methods (2nd ed.)*. Sage.
42. Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
43. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.)*. Sage.
44. Suleman, I. (2016). *Nilai tradisional dalam politik lokal Gorontalo*. Jurnal Politik Lokal Indonesia, 1(1), 34–48.
45. Sudirman, R. (2020). *Modernitas dan tradisi dalam komunikasi politik lokal*. Jurnal Komunikasi Politik, 5(2), 98–112.
46. Taubah, R. (2018). *Transisi perilaku pemilih dalam pemilu lokal di Gorontalo*. Jurnal Sosial dan Politik, 6(3), 210–225.
47. Thomas, D. R. (2006). *A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data*. American Journal of Evaluation, 27(2), 237–246.